

**EVALUASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG**

Shahnaz Dyah Purwanto, R. Slamet Santoso  
**Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

**ABSTRAK**

Program pencatatan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang guna menata dan menertibkan dokumen kependudukan masyarakat Kota Semarang. Peran pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sangat penting dalam keberhasilan program pencatatan akta kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan mengetahui penghambat serta pendorong berjalannya program tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn yang memiliki lima indikator dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan. Lima indikator tersebut adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat capaian dari program pencatatan akta kematian di Kota Semarang masih rendah jika dibandingkan dengan program lainnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, yaitu sebesar 31,51%. Ditemukan hal – hal yang menghambat berjalannya program yaitu kurangnya komunikasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah memperbanyak sumber daya manusia dan memperbaiki pola komunikasi.

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Akta Kematian, Administrasi Kependudukan*

## **ABSTRACT**

The program of recording the death certificate by the Population and Civil Registration Office of the City of Semarang is one of the steps taken by the Semarang City Government to organize and discipline the population documents of the Semarang City community. The role of the government, especially the Semarang Population and Civil Registration Service, is very important in the success of the death certificate registration program. This study aims to evaluate the results of the program of recording the death certificate in the Semarang City Population and Civil Registration Service and knowing the obstacles and driving the program. The theory used in this study is the theory of William Dunn who has five indicators in conducting policy evaluation activities. The five indicators are effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness.

Based on the results of the study showed that the level of achievement of the principle of recording death certificates in the city of Semarang was still low when compared to other programs related to population documents, which amounted to 31.51%. Found things - things that hinder the running of the program namely lack of adequate communication and human resources. The recommendation that can be given is to increase human resources and improve communication patterns.

**Keywords:** *Evaluation, Death Certificate, Population Administration*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga Negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.” Yang kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1. Saat ini, banyak kasus yang terjadi terkait dengan masalah Administrasi Kependudukan di berbagai daerah di Indonesia. Adanya pungutan liar, keterlambatan pengurusan surat kependudukan oleh masyarakat, serta penerbitan dokumen kependudukan yang lama menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam urusan Pencatatan Kependudukan yang dialami masyarakat maupun pemerintah. Berbagai usaha juga dilakukan agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi dan di minimalisir.

Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa memiliki dokumen kependudukan adalah hal yang penting. Dokumen kependudukan sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari. dimulai dari akta kelahiran, e-KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian. mengetahui rasio jumlah penduduk di Indonesia sangatlah penting, cara yang *valid* untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan pencatatan akta. Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah administratif di Indonesia, serta kota dimana banyak berbagai macam penduduk yang memiliki perbedaan statu kewarganegaraan baik WNA maupun WNI, maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan. Agar tidak terjadi pencatatan jumlah penduduk yang tidak akurat akibat banyaknya penduduk yang datang dan pergi yang berakibat kekacauan pada sistem kependudukan nasional maka data kependudukannya harus dikelola dengan baik. Tabel Disdukcapil pada Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 sampai 2016 menunjukkan presentase kegiatan pembuatan akta kematian di Disdukcapil sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**

**Pencapaian Target RPJMD Kota Semarang pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

No	Indikator Kinerja	Target	Target Kinerja RKPD				Status Pencapaian
			Target	Realisasi RKPD			
				2014	2015	2016	
1	Rasio penduduk meninggal berakta kematian	100	100	2060	290	311	Sangat Rendah
2	Terseadinya prana dalam peningkatan kesadaran masyarakat	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

dalam tertib administrasi kependudukan							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : RKP Kota Semarang Tahun 2014-2016

Tabel Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014, 2015, dan tahun 2016 serta Pencapaian Target RPJMD pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat dua indikator dalam program pencatatan akta kematian di Dukcapil. Dari indikator tersebut capaian program penduduk meninggal berakta kematian masih tergolong rendah berada di angka 20,60% dari target 100% pada tahun 2014. Capaian tersebut belum sampai setengah dari target tinggi yang telah ditentukan. Padahal akta merupakan surat yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat yang menetap dan tinggal di Indonesia. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada rasio penduduk meninggal berakta kematian di angka 29%. Adanya peningkatan tersebut diharapkan pihak Dukcapil agar terjadi secara konsisten dan terus menerus

agar target akhir dapat tercapai segera mungkin. Lalu, pada tahun 2016 juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 31,51% yang masih jauh dari target yang diinginkan yaitu sebesar 100%.

Target pencatatan akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kematian tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah kecil di pedalaman Indonesia yang memang belum mengerti tentang kegunaan akta kematian dan seberapa besar efek bagi dirinya maupun negaranya, tetapi juga di kota-kota yang besar, salah satu contohnya adalah Kota Semarang yang persentase kepengurusan akta kematiannya bisa dikatakan sangat rendah dan tidak terlihat adanya kenaikan yang signifikan.

Tingkat kepatuhan tentang tertib administrasi kependudukan tidak

sebanding dengan jumlah penduduk Kota Semarang . Penduduk Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.741.824 jiwa, sedangkan tahun 2012 sebesar 1.719.228 jiwa, terdapat 22.596 atau 1,30 % peningkatan, peningkatan tersebut disebabkan oleh mutasi penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID) pada tahun 2013. Tingkat capaian pembuatan akta kematian yang rendah menunjukkan partisipasi masyarakat masih kurang dalam menjalankan kebijakan yang sudah diberikan pemerintah. Dalam hal tersebut maka pelayanan tertib administrasi kependudukan yang baik, inovatif dan berkualitas harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengulas dan meneliti terkait Pelaksanaan Pencatatan Akta Kematian dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Semarang dengan mengangkat judul **“Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ?
2. Hambatan apa yang dialami dalam Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dialami pada Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

### D. Kajian Teori

#### Evaluasi Kebijakan

Subarsono dalam bukunya berjudul Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru bisa dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Sebab

kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat daripada suatu kebijakan atau program maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relative lebih cepat semenjak ditetapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Evaluasi kebijakan publik yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil. Aspek proses menunjuk bahwa apakah selama implementasi program seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan ? sedangkan aspek hasil menunjukkan bahwa apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (*output* dan *outcomes* ).

#### 5 indikator evaluasi :

1. Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau akibat yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur ongkos moneter.
3. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha-usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

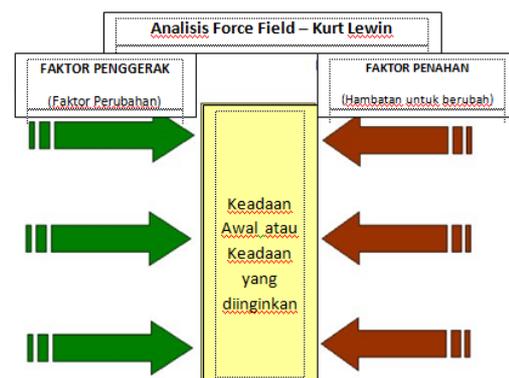
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

### ***Force Field Analysis***

dikembangkan oleh Kurt Lewis (1951) secara lugas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program perubahan dalam organisasi. Metode ini merupakan metode yang tepat untuk mendapat gambaran umum yang komprehensif dari kekuatan yang berbeda yang bertindak pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta dapat menilai sumber serta kekuatan mereka.

**Gambar 1. 1**

#### **Analisis Force Field – Kurt Lewin**



Adanya perubahan, force fields terletak sebagai penyeimbang antara gaya yang menguntungkan untuk berubah dan yang menahannya. Lewin berbicara tentang keberadaan keseimbangan sosial semu-stasioner. Analisis Force Field dari Lewin

digunakan untuk membedakan faktor yang mendorong seseorang untuk menuju atau menjauh dari keadaan yang diinginkan dalam Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan yang menentang kekuatan pendorong. Ini dapat dianalisis untuk memberitahukan keputusan yang akan membuat perubahan menjadi lebih dapat diterima.

## **E. Metode Penelitian**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh bersumber dari data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku dan dokumen pendukung lainnya.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya

dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Evaluasi Program Pencatatan**

#### **Akta Kematian di Dinas**

#### **Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan sebuah program nasional yang telah dijalankan sesuai dengan regulasi pemerintah pusat yang ada. Proses evaluasi secara umum bisa dimulai ketika suatu program telah berjalan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mempermudah penilaian keberhasilan program menurut William Dunn ada lima indikator evaluasi yang dapat dilihat dari :

#### **1. 1. Efektivitas**

Dalam implementasinya, program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, tetapi target yang dipasangkan pada RPJMD Kota

Semarang tahun 2016 yaitu sebesar 100% belumlah tercapai. Pada tahun 2016 pencapaian akhir jumlah penduduk yang memiliki akta kematian hanya 31.51% saja. Angka tersebut merupakan capaian paling rendah jika dibandingkan program administrasi kependudukan lainnya yang ada di Kota Semarang. Pemerintah sudah memerintahkan setiap daerah supaya patuh dan juga tertib dalam kegiatan administrasi kependudukan semenjak diterbitkan Undang – undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan di Indonesia yaitu Undang – Undang No. 24 Tahun 2013.

## 2. Efisiensi

hubungan antara efektivitas dengan usaha apa yang dilakukan untuk mencapai efektivitas tersebut. Usaha yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ditetapkan dengan cara pendekatan terhadap *target groups* yaitu masyarakat Kota Semarang dengan melakukan program

tertentu yang berkaitan dengan pencatatan akta kematian.

## 3. Kecukupan

seberapa jauh suatu tingkat eektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses pencatatan akta kematian merupakan hal yang dibahas pada poin ini. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Semarang memiliki masalah yang cukup beragam. Masalah yang dialami oleh pemberi layanan yaitu dinas serta masalah yang dialami oleh penerima layanan yaitu masyarakat.

## 4. Perataan

perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kemudahan akses

serta keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan layanan maupun informasi yang berkaitan dengan Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan salah satu faktor pendukung. Informasi berkaitan dengan pencatatan akta kematian harus diketahui jelas oleh masyarakat.

#### 5. Responsivitas

seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mengamati tingkat kepuasan masyarakat Kota Semarang terkait Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta melihat dukungan untuk program tersebut.

#### **b. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Faktor pendorong yang pertama adalah, adanya regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dianggap fondasi dari apa yang dikerjakan. Di dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 3. Selain regulasi, faktor pendorong lainnya adalah fasilitas fisik yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Fasilitas fisik yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah fasilitas mobil keliling, mobil tersebut merupakan bentuk dari pelayanan yang fleksibel serta bertujuan agar pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat Kota Semarang.

Faktor penghambat yang pertama ada sumber daya manusia yang kurang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membutuhkan banyak sumber daya manusia. Faktor ke dua

adalah faktor komunikasi antar para implementor.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk melihat bagaimana proses evaluasi ini berjalan, penulis memakai lima indikator yang menjadi dasar penilaian evaluasi program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kelima indikator tersebut, antara lain (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas. Berdasarkan kelima indikator dari William Dunn tersebut, pelaksanaan program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah berjalan cukup baik terutama pada indikator efektivitas, efisiensi, perataan, dan responsivitas.

Faktor yang menjadi penghambat Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia  
Kurangnya komunikasi oleh implementor program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

2. Sikap masyarakat yang sebagian besar masih menyepelekan ketertiban administrasi kependudukan meskipun mereka sudah mengetahui manfaat serta kepentingannya.

Sedangkan, faktor yang menjadi pendorong Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu :

1. Regulasi sebagai fondasi pelaksanaan program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Fasilitas fisik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang  
Saran

### **Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

1. Efektivitas  
konsisten dalam melaksanakan program – program pendukung agar target yang ada bisa tercapai.
2. Efisiensi  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang lebih memperhatikan usaha –

usaha pendukung program yang sekiranya tepat dan lebih efisien dalam membantu terwujudnya efektivitas. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih aktif dalam menggunakan social media dengan tujuan sebagai sarana sosialisasi yang efisien.

3. Kecukupan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang harus meningkatkan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada khususnya pada bagian pencatatan akta kematian. Komunikasi serta koordinasi sesama implementor harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertukar informasi antar implementor
4. Perataan  
Memperluas penyampaian informasi dan juga akses masyarakat terhadap kegiatan pencatatan dokumen administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
5. Responsivitas  
Meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar

menghasilkan outcome yang lebih maksimal.

### **Strategi Optimalisasi Pendorong dan Minimalisasi Penghambat**

Dari tiga faktor pendorong program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang maka sudah seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang meningkatkan kualitas yang sudah tersedia seperti menambah jumlah fasilitas fisik berupa mobil keliling sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang melakukan pencatatan dokumen kependudukan. Sedangkan untuk meminimalisir penghambat yang ada maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang seharusnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan partisipasi terkait dokumen kependudukan khususnya akta kematian. Disamping itu sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media masa yang ada agar informasi yang ingin disampaikan bisa lebih merata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga sebaiknya meningkatkan kuantitas pegawai yang berkaitan dengan program pencatatan akta kematian,

agar memudahkan berjalannya program, dan menciptakan pola komunikasi yang lebih baik lagi antar implementor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada. University Press.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta:CAPS.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

## Sumber Regulasi :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014.